

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, jurnal dan sumber lain.

Adi, M. Kwartono. 2007. Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: CV, Andi Offset.

Hestanto. (2021). Penerimaan Pajak. Retrieved from Hestanto Personal Website:
<https://www.hestanto.web.id/penerimaan-pajak/>

Kemenkeu. (2021). Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Andi Offset

Mulyono, S. (1996). Teori Pengambilan Keputusan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Primiana, Ina. (2009). Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri. Bandung: Alfabeta.

Rudjito. (2003). Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI.

Sukarno, P. A. (2019). Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM. Ekonomi Bisnis. Retrieved from : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>

B. Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nomor PER-35/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstentifikasi. Jakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS). Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstentifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Jakarta.